

INKLUSI di Sulawesi Selatan

NO-ONE IS LEFT BEHIND



INKLUSI bekerja sama dengan empat organisasi masyarakat sipil (OMS) dan jaringannya di Sulawesi Selatan, yaitu Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), KAPAL Perempuan, Partnership for Governance Reform (Kemitraan), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) – untuk memajukan seluruh upaya mereka untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi di dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi di perekonomian. Para mitra OMS ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh bukti, pembelajaran, dan pengalaman kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan yang berdampak pada mereka.

- 4 Mitra CSO
- 5 kabupaten/kota
- 49 desa

Meningkatkan akses layanan dasar di daerah terpencil dan marginal



Pertemuan informal Sekolah Perempuan oleh KAPAL Perempuan

KAPAL Perempuan mengadvokasi pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022. Advokasi kepada pemerintah pusat dan daerah ditujukan untuk mendorong agar berbagai peraturan yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Di Sulawesi Selatan, mitra lokal Kapal Perempuan, YKPM, bekerja di 11 desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang memiliki tingkat kemiskinan dan perkawinan anak yang selalu tinggi dari waktu

ke waktu. YKPM menjalankan **Sekolah Perempuan, sebuah sarana pendidikan informal** yang diinisiasi oleh KAPAL Perempuan. Sekolah Perempuan mempromosikan pemberdayaan perempuan, dan membangun kapasitas organisasi, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan melalui pendidikan informal. Kelompok perempuan di **Sekolah Perempuan** merupakan inti dari advokasi dan pengembangan berbagai inisiatif lokal untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

Salah satu inisiatif lokal yang ada adalah stasiun radio YKPM-Sekolah Perempuan yang bernama Sipurenu. Melalui stasiun radio ini, para perempuan membangun kesadaran masyarakat tentang berbagai akibat perkawinan anak, pasal-pasal baru di dalam UU TPKS untuk menghapus kekerasan, dan memberikan informasi tentang cara mengakses berbagai layanan dan program pemerintah.



Pos pengaduan untuk mengadvokasi program-program identitas hukum dan perlindungan sosial, rujukan bagi korban kekerasan, dan pencegahan perkawinan anak.



Tim Pemantau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) untuk memperkuat advokasi berbasis bukti dengan menggunakan data GEDSI yang dikumpulkan dari kegiatan *monitoring*.



Pusat Sumber Daya GEDSI untuk mendokumentasikan pengalaman perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.



Koperasi ekonomi untuk memfasilitasi pengembangan usaha yang dijalankan oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, serta memperoleh pendanaan dan bantuan dari pemerintah.

Melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan

Di Sulawesi Selatan, BaKTI bekerja melalui mitra lokal, yaitu YESM Tana Toraja dan YLP2EM Parepare untuk mengadvokasi pelaksanaan UU TPKS dan Inklusi Disabilitas melalui penyusunan peraturan daerah dan pembentukan unit layanan pemerintah.

Melalui inisiatif Reses Partisipatifnya, BaKTI membentuk kelompok masyarakat untuk mempromosikan konsultasi bermakna antara anggota parlemen dan pemerintah dengan **kelompok konstituennya**. Para perwakilan desa dilatih untuk

melaporkan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, dan mengadvokasi layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan perkawinan anak. Mereka juga mengadvokasi program-program dan kebijakan penganggaran yang inklusif untuk meningkatkan akses kepada layanan dan sumber daya pemberdayaan ekonomi. Kelompok konstituen telah dibentuk di 30 desa sasaran BaKTI, dan telah berhasil mengadvokasi sejumlah kebijakan inklusif.



Peraturan Bupati Maros tentang Sistem Perlindungan Anak. Dikembangkan melalui kolaborasi multi-pemangku kepentingan antara BaKTI dan PKBI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Sosial.



Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk di Tana Toraja dan Parepare. Unit-unit layanan ini dimandatkan oleh UU TPKS untuk membantu mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan dan berkoordinasi dengan penyedia layanan lainnya.

Kelompok konstituen BaKTI melakukan pendataan tentang prevalensi disabilitas di wilayah kerja mereka.

Mempromosikan pendidikan, lapangan kerja, dan perencanaan pemerintah yang inklusif disabilitas

Unit Layanan Disabilitas
Pemerintah Kabupaten Maros.

Gambar: BaKTI.



BaKTI memimpin aksi kolektif dan kerja sama di Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan sektor swasta untuk memperluas kesempatan untuk menyusun perencanaan pemerintah, dan menciptakan lapangan kerja dan pendidikan yang inklusif disabilitas.

Pemerintah desa melaksanakan UU Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kabupaten Maros telah mendukung asesmen desa BaKTI yang merujuk kepada **12 kriteria peraturan Desa Inklusif**. Peraturan desa inklusif dan peraturan daerah memungkinkan pendanaan diberikan untuk memberikan 'akomodasi layak' bagi penyandang disabilitas di fasilitas-fasilitas umum.

Pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. BaKTI telah meluncurkan uji coba (*pilot*) Sekolah Inklusif dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maros untuk meningkatkan akses anak penyandang disabilitas dan anak dengan kebutuhan belajar khusus ke sekolah umum.

Peluang kerja bagi anak muda penyandang disabilitas di sektor swasta. BaKTI memfasilitasi perekrutan empat anak muda penyandang disabilitas ke beberapa usaha pariwisata dan keuangan di Maros. Untuk melakukan hal ini, mereka menggunakan data disabilitas di daerah tersebut, menerapkan pelatihan dan keahlian *mentoring* mereka, dan bekerja dengan Sekretariat INKLUSI untuk memfasilitasi kolaborasi-kolaborasi baru. Salah satu mitra waralaba hotel juga membantu BaKTI dan badan usaha sosial desa dengan memasarkan dan menjual produk-produk mereka di hotel-hotel mereka.

Mengakui hak disabilitas demi pembangunan inklusif. BaKTI dan Pemerintah Kabupaten Maros menginisiasi **Forum Disabilitas Masyarakat (FORDISMA)**. Forum ini berfungsi sebagai media/*platform* bagi penyandang disabilitas untuk berjejaring, berpartisipasi aktif, dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan FORDISMA adalah menjadi organisasi mitra pemerintah dan terlibat aktif di dalam promosi kebijakan-kebijakan terkait inklusi disabilitas.

Memberdayakan Masyarakat Adat

Kemitraan menjangkau masyarakat adat dan etnis minoritas di tempat terpencil di Sulawesi Selatan.



Kemitraan bekerja sama dengan para perempuan, anak, dan masyarakat adat untuk beradvokasi di tingkat nasional dan lokal untuk mendorong diadopsinya rancangan kebijakan tentang masyarakat adat.

Isolasi geografis dan marginalisasi masyarakat adat dan etnis minoritas menyebabkan hambatan untuk mengakses layanan pemerintah, untuk memperoleh dokumen identitas hukum dari pemerintah daerah. Kepemilikan identitas hukum kemudian memberikan akses kepada perempuan dan anak perempuan kepada fasilitas kesehatan dan sekolah, serta program bantuan sosial berbasis keluarga. Sekretariat INKLUSI memperkuat kemampuan Kemitraan dalam pengumpulan data jarak jauh,

analisis, dan kemampuan manajemen data untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut.

Perempuan juga tereksklusi dari proses pengambilan keputusan pembangunan desa dan masyarakat adat maupun pengelolaan hutan adat, akibat norma tradisional berbasis gender, nilai agama, dan hukum adat yang menempatkan perempuan di peran domestik. Kemitraan berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui program Estungkara.

Mitra lokal Kemitraan, yaitu Sulawesi Community Foundation (SCF), melaksanakan Program Estungkara di dua desa di Kabupaten Maros. Estungkara berfokus pada tiga area utama yang terkait dengan tata kelola inklusif dan hak warga negara.



Akses kepada layanan dasar, perlindungan sosial, program pemerintah, dan perlindungan dari kekerasan



Partisipasi di berbagai forum hukum adat



Keanggotaan di kelompok ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi di pengelolaan sumber daya alam

Mendukung anak-anak di dalam sistem peradilan

PKBI membantu anak yang berhadapan dengan hukum dan waria untuk mengatasi diskriminasi dan hak warga negara yang belum terpenuhi, yang turut menyebabkan kemiskinan, eksklusi sosial, dan ketidakberdayaan dalam mengakses layanan kesehatan umum, pendidikan, dan sosial.

PKBI bekerja sama dengan lembaga permasyarakatan (LPKA) dan penyedia layanan untuk memperkuat akses kepada layanan bagi anak-anak di fasilitas LPKA. Layanan-layanan ini mencakup dokumentasi identitas hukum, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. **PKBI Sulawesi Selatan bekerja di lima desa di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.**

LPKA untuk membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan membangun kapasitas dan keterampilan mereka.



Bekerja sama dengan sistem peradilan anak untuk menerapkan pendekatan yang peka terhadap anak.

PKBI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal

Lembaga pemasyarakatan

menyusun panduan bagi para petugas lapas untuk menangani, merujuk dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Di Sulawesi Selatan, cabang lokal PKBI mengadvokasi kebijakan dan panduan ini di kabupaten wilayah kerja mereka.



Meningkatkan akses ke pendidikan bagi anak-anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Selama ini, anak-anak di LPKA hanya dapat mengakses pendidikan/sekolah informal yang terbatas dan bersifat

ad-hoc. PKBI mengadvokasi agar

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dinas pendidikan menjalankan asesmen kebutuhan bagi anak-anak di LPKA. Dengan dukungan dari Sekretariat INKLUSI, PKBI juga berupaya menjembatani hubungan dengan swasta, dan hingga saat ini, Jotun Paints telah sepakat untuk mendonasikan cat untuk merenovasi ruang kelas di LPKA di Maros.



Anak menerima dokumen identitas hukum.

PKBI telah memfasilitas layanan keliling dari kantor dukcapil untuk menerbitkan KTP dan KIA bagi para narapidana

anak di LPKA. Akses ke identitas

hukum akan memfasilitasi akses selanjutnya ke berbagai layanan dan program penting pemerintah.



Suara anak didengar melalui berbagai forum anak.

PKBI mengadvokasi agar lembaga penegak hukum membangun kesadaran tentang manfaat pembentukan dan mendukung forum anak di LPKA.

Untuk mendorong penggunaan oleh

LPKA, PKBI akan terus mendorong kolaborasi antar-dinas, termasuk dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mengawasi forum anak di tingkat kabupaten.

NO-ONE IS LEFT BEHIND

Tidak Ada Satupun yang Tertinggal

INKLUSI

Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, disingkat INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 - 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, 129 kabupaten, dan 650 desa di Indonesia.

KONTAK

✉ info@inklusi.or.id

🌐 www.inklusi.or.id